

**LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2003**



Diterbitkan Juli 2004
Data Januari 2003 - Desember 2003



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Alamat : Jalan F. L. Tobing Nomor 24 Padangsidimpuan
Telepon : (0634) 21922

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2003 selesai dilaksanakan.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah dan Basis Data Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan disusun sebagai bagian dari akuntabilitas publik dengan menggunakan metode pressure-state-response (P-R-S).

Laporan ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan informasi tentang isu-isu utama lingkungan hidup di daerah ini dan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan dalam upaya mengelola dan mengendalikan dampak negatif dari pembangunan yang dilaksanakan.

Terima kasih diucapkan kepada Dinas/instansi terkait, Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan masyarakat yang berkenan sebagai nara sumber dalam penyusunan laporan ini.

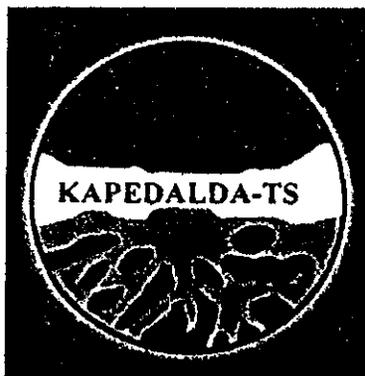
Padangsidempuan, Juli 2004



**LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2003**



Diterbitkan Juli 2004
Data Januari 2003 – Desember 2003



**KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Alamat : Jalah F.L. Tobing Nomor 24 Padangsidimpuan
Telepon : (0634) 21922

ABSTRAK

Kabupaten Tapanuli Selatan terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor : 70 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian melalui Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2001, Daerah ini di mekarkan menjadi 3 (tiga) daerah otonomi yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Padangsidempuan sehingga luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi 12.261,55 Km² (1.226.155 ha) dengan 28 Kecamatan, 1.224 Desa dan 13 Kelurahan.

Daerah ini terletak pada bagian selatan Propinsi Sumatera Utara yang secara geografis terletak pada 0°10' sampai dengan 1°50' Lintang Utara dan 98°50' Bujur Timur sampai dengan 100°10' Bujur Timur, dengan batas wilayah administrative sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Propinsi Sumatera Utara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Mandailing Natal
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Riau dan Kabupaten Labuhan Batu
-

ABSTRAK

Kabupaten Tapanuli Selatan terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor : 70 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian melalui Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2001, Daerah ini di mekarkan menjadi 3 (tiga) daerah otonomi yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Padangsidimpuan sehingga luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi 12.261,55 Km² (1.226.155 ha) dengan 28 Kecamatan, 1.224 Desa dan 13 Kelurahan.

Daerah ini terletak pada bagian selatan Propinsi Sumatera Utara yang secara geografis terletak pada 0°10' sampai dengan 1°50' Lintang Utara dan 98°50' Bujur Timur sampai dengan 100°10' Bujur Timur, dengan batas wilayah administrative sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Propinsi Sumatera Utara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Mandailing Natal
- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Riau dan Kabupaten Labuhan Batu

Berada pada ketinggian 0 meter dpl (Desa Muara Upu di Kecamatan Padangsidempuan Barat) sampai pada 2009 meter dpl (Puncak Gunung Tapulonanjing di Kecamatan Saipar Dolok Hole) dengan bentang lahan yang bervariasi mulai dari daerah bertopografi datar (Kemiringan 0 - 2%) seluas 317.498 ha (Kemiringan 25, 89 %), landai hingga bergelombang (kemiringan 2 - 15%) seluas 154.434 ha (12,59 %), bergelombang hingga berbukit (Kemiringan 15 - 40%) seluas 245.214 ha (20 %) dan kawasan pegunungan (kemiringan di atas 40 %) seluas 509.009 ha (41,52 % dari luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan), yang tersebar di setiap Kecamatan.

Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai sarana dan prasarana yang tidak merata untuk setiap kecamatan. Ada beberapa kecamatan telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai terutama ibukota kecamatan Padangsidempuan Barat, Batang Toru, Batang Angkola, Sipirok dan Padang Bolak yang perkembangannya sudah mengarah kepada kota. Dan kecamatan-kecamatan yang baru terbentuk pada umumnya mempunyai sarana dan prasarana yang sangat minim, misalnya Kecamatan Aek Bilah belum memiliki jalan beraspal.

Isu-isu utama lingkungan hidup yang melanda daerah ini adalah:

1. Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan penyebabnya adalah Tuntutan pemanfaatan sumber daya hutan terhadap manfaat langsung (*Tangible Benefit*) dan manfaat tidak langsung (*Intangible Benefit*) oleh masyarakat pada umumnya terus meningkat, misalnya semakin deras permintaan pasar akan komoditi kayu

dan ^b besarnya keuntungan sesaat yang diperoleh. Disamping itu, ² adanya desakan dari penambahan jumlah penduduk mendorong masyarakat membuka lahan-lahan baru untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Dan juga akibat ³ Kegiatan pembukaan areal perkebunan dan pertanian yang dilakukan masyarakat dan pengusaha masih sering dilakukan dengan cara membakar, hal ini dimaksudkan untuk melakukan penghematan biaya dan mempersingkat waktu pada tahap pembersihan lahan (*land clearing*).

2. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air

Penurunan kualitas pada umumnya belum mencapai pada taraf tercemar kecuali Sungai Batang Ayumi dan Aek Sibunbar (Anak Sungai Batang Angkola). Kedua sungai ini mengalami pencemaran akibat sampah domestik, kotoran manusia, limbah industri kecil dan limbah rumah tangga dari penduduk terutama penduduk Kota Padangsidempuan.

3. Penurunan Kesuburan Tanah Pertanian

Penurunan kesuburan tanah pertanian akibat Teknik bercocok tanam yang dilakukan masih ¹ belum memperhatikan daya dukung dan kemampuan tanah untuk menopang komoditi yang akan ditanam dan belum banyak menggunakan teknik konservasi tanah. Dan juga akibat terjadi ² alih fungsi lahan-lahan pertanian untuk penggunaan lain terutama pemukiman akibat dari penambahan jumlah penduduk, tingginya harga tanah dan besarnya nilai ekonomi yang diperoleh jika lahan pertanian digunakan untuk penggunaan lain.

4. Penyusutan Keanekaragaman Hayati

Pengkonversian areal hutan menjadi areal perkebunan monokultur, banyaknya kasus kerusakan hutan dan banyaknya perburuan liar yang dilakukan masyarakat mendorong penyusutan keanekaragaman yang dimiliki serta penggunaan bahan peledak, racun dan listrik dan juga akibat dari penurunan kualitas dan kuantitas sungai dan danau.

5. Sanitasi Lingkungan

Desa-desa belum mempunyai fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk membuat lingkungan menjadi asri, misalnya tidak ada saluran pembuangan, tidak memiliki septi tank dan tidak ada tempat yang dikhususkan untuk membuang sampah.

Sampah yang berasal dari pemukiman Hampir sebagian besar terbuang sembarang dan banyak dari sampah ini justru masuk ke sungai melalui selokan-selokan atau yang memang sengaja dibuang langsung ke sungai dan ada juga masyarakat yang membakar sampahnya terutama desa-desa, hal ini mengakibatkan udara kurang nyaman.

1 Kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup beragam dipengaruhi oleh latar belakang pekerjaan, tingkat ekonomi, pendidikan, kesadaran dan kepentingan pribadi dan budaya setempat. Munculnya permasalahan lingkungan pada umumnya disebabkan perilaku manusia yang kurang memperhatikan aspek ekologi. Kerusakan hutan, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air dan lahan pertanian dan penyusutan keanekaragaman hayati cenderung akibat kerakusan manusia

dalam mengeksploitasi sumber daya alam, sedangkan masalah kebersihan lingkungan lebih cenderung kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan.

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup ditekankan kepada upaya mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang seimbang dan hemat serta mengadakan upaya pemulihan kembali terhadap kerusakan dan pencemaran yang timbul akibat dari kegiatan pembangunan fisik dan ekonomi dengan memperhatikan perkembangan kependudukan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Kebijakan tata ruang wilayah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan ruang, sehingga rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan berisi :

1. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya
2. Pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu
3. Sistem kegiatan pembangunan dan system pemukiman pedesaan dan perkotaan
4. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prsarana pengelolaan lingkungan.
5. Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan sumber daya alam lainnya serta memperhatikan keterpaduannya dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Sedangkan kebijakan sosial yang diambil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan lebih diutamakan pada peningkatan mutu sumber daya manusia, kelembagaan dan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan nasional dengan memberikan batuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bencana alam.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
I. PENDAHULUAN	
1. Isu-isu Utama Lingkungan Hidup.....	1
1.1. Kerusakan Hutan.....	3
1.2. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air.....	4
1.3. Penurunan Kesuburan Tanah Pertanian.....	4
1.4. Penyusutan Keanekaragaman Hayati.....	5
1.5. Sanitasi Lingkungan	5
2. Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Kelestarian Lingkungan.....	6
3. Tujuan	8
4. Metodologi Penyusunan	8
4.1. Lingkup Kegiatan.....	8
4.2. Metode Pengambilan Data	9
4.3. Metode Analisis	9
4.4. Sistematika.....	10
II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	
1. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup	12
2. Kebijakan Tata Ruang	15
2.1. Kawasan lindung	17
2.2. Kawasan Budidaya.....	21
3. Kebijakan Sosial, Ekonomi dan Budaya	27
III. ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN	
1. Analisis Kebijakan	30
1.1. Kerusakan Hutan.....	31
1.2. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air.....	35
1.3. Penurunan Kesuburan Tanah Pertanian.....	40
1.4. Penyusutan Keanekaragaman Hayati.....	42
1.5. Sanitasi Lingkungan	44
2. Evaluasi Kebijakan	47
IV. REKOMENDASI	50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Lubuk larangan yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2003	7
Tabel 2. Jumlah Industri Besar yang Terdapat Di Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Tahun 2003.....	36
Tabel 3. Titik Pengambilan Sampel Limbah Cair Industri Di Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Tahun 2003	38
Tabel 4. Rata-rata Hasil Pengujian Limbah Cair Industri Pada Titik Outlet Di Kabupaten Tapanuli Selatan Selama Tahun 2003	38
Tabel 5. Jumlah dan Latar Belakang Pendidikan Aparatur Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Tahun 2003.....	48

I. PENDAHULUAN

1. Isu Utama Lingkungan Hidup

Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan menyebutkan pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini sebagai bagian dari lingkungan hidup hanya manusia yang memiliki kemampuan mengeksploitasi dan memodifikasi lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan hidupnya.

Kemampuan manusia untuk mengeksploitasi dan memodifikasi lingkungan hidup tergantung kepada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. Semakin maju tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi maka kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan semakin besar. Masyarakat yang masih primitif hanya mampu membuka hutan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Sebaliknya masyarakat yang sudah maju dapat mengubah lingkungan sampai pada taraf irreversibel, misalnya gunung-gunung dapat dibelah atau dipotong sesuai dengan keperluannya., hutan dalam skala yang sangat luas dapat diubah menjadi perkebunan dan pemukiman dalam waktu yang sangat singkat.

Beberapa dasawarsa ini Indonesia dan Negara berkembang lainnya berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan dari Negara maju dengan melakukan pembangunan yang

menitikberatkan pertimbangan pada aspek ekonomi, sedangkan aspek ekologi dan aspek sosial budaya sering diabaikan. Hal ini mengakibatkan munculnya persoalan-persoalan lingkungan dan sosial budaya sebagai dampak negatif dari pembangunan tersebut, misalnya pencemaran air dan udara di kawasan industri dan perkotaan, pemanasan global, perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut.

Permasalahan lingkungan yang dialami ditingkat regional dan dunia juga dirasakan Kabupaten Tapanuli Selatan seperti perubahan iklim dan kenaikan suhu bumi mengakibatkan terjadinya perubahan musim dan iklim mikro. Beberapa tahun terakhir ini musim menjadi tidak teratur, adakalanya musim kemarau lebih panjang dan kadangkala sebaliknya atau sangat kering pada musim kemarau dan surplus air pada musim penghujan sehingga banjir sering terjadi terutama pada daerah-daerah pertanian yang disekitar sungai.

Perubahan iklim dan tidak teraturnya musim berimbas pada produksi pertanian dan perilaku masyarakat di dalam mengelola lahan pertaniannya, misalnya tidak sedikit yang menanam sawah dengan tanaman tahunan, terjadinya perubahan musim tanam dan musim panen.

Kabupaten Tapanuli Selatan tergolong daerah agraris yang sebahagian besar penduduknya berdomisili di pedesaan yang berbatasan langsung dengan areal pertanian, perkebunan dan kawasan hutan bahkan masih ada desa yang belum dapat dilalui kendaraan roda dua. Isu-isu lingkungan yang muncul di daerah ini pada umumnya menyangkut dampak negatif dari pengelolaan sumber daya alam yang kurang memperhatikan aspek ekologi. Beberapa isu utama

lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Selatan yang terjadi pada tahun 2003 yaitu sebagai berikut :

1.1. Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan merupakan permasalahan yang sangat rumit karena penyebabnya tidak hanya berasal dari daerah ini tetapi juga menyangkut masyarakat luas dari daerah ini. Tuntutan pemanfaatan sumber daya hutan terhadap manfaat langsung (*Tangible Benefit*) dan manfaat tidak langsung (*Intangible Benefit*) oleh masyarakat pada umumnya terus meningkat, misalnya semakin deras permintaan pasar akan komoditi kayu dan besarnya keuntungan sesaat yang diperoleh.

Disamping itu, adanya desakan dari pertambahan jumlah penduduk mendorong masyarakat membuka lahan-lahan baru untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Lahan yang paling potensial untuk lahan pertanian dan perkebunan di daerah ini hanyalah areal hutan sehingga areal hutan di sekitar pemukiman yang menjadi sasaran perluasan areal pertanian dan perkebunan.

Kegiatan pembukaan areal perkebunan dan pertanian yang dilakukan masyarakat dan pengusaha masih sering dilakukan dengan cara membakar, hal ini dimaksudkan untuk melakukan penghematan biaya dan mempersingkat waktu pada tahap pembersihan lahan (*land clearing*).

1.2. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air

Pada umumnya sumber air bersih di Kabupaten Tapanuli Selatan belum menjadi masalah, tetapi akhir-akhir ini sudah terlihat penurunan kuantitas air secara bertahap. Hal ini terlihat terutama di daerah-daerah yang curah hujan rendah (Kecamatan Padang Bolak, Padangbolak Julu, Halongonan, dll) semakin susah menemukan air bersih pada musim kemarau.

Penurunan kualitas pada umumnya belum mencapai pada taraf tercemar kecuali Sungai Batang Ayumi dan Aek Sibunbar (Anak Sungai Batang Angkola). Kedua sungai ini mengalami pencemaran akibat sampah domestik, kotoran manusia, limbah industri kecil dan limbah rumah tangga dari penduduk terutama penduduk Kota Padangsidimpuan.

1.3. Penurunan Kesuburan Tanah Pertanian

Penurunan kesuburan tanah pertanian di Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan dampak aktivitas dan pola perilaku masyarakat dalam mengolah lahan-lahan pertaniannya. Teknik bercocok tanam yang dilakukan masih belum memperhatikan daya dukung dan kemampuan tanah untuk menopang komoditi yang akan ditanam dan belum banyak menggunakan teknik konservasi tanah.

Terjadi alih fungsi lahan-lahan pertanian untuk penggunaan lain terutama pemukiman akibat dari penambahan jumlah penduduk, tingginya harga tanah dan besarnya nilai ekonomi yang diperoleh jika lahan pertanian digunakan untuk penggunaan lain.

1.4. Penyusutan Keanekaragaman Hayati

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki kekayaan biodiversity yang besar, terdapat beberapa flora dan fauna yang dilindungi misalnya, Harimau, Gajah, Burung Beo, dan lain-lain. Tetapi seiring dengan pengkonversian areal hutan menjadi areal perkebunan monokultur, banyaknya kasus kerusakan hutan dan banyaknya penangkapan yang dilakukan masyarakat mendorong penyusutan keanekaragaman yang dimiliki.

Biota airpun mengalami penyusutan, sejumlah spesies ikan telah lama tidak dijumpai lagi di sungai-sungai yang menjadi habitatnya. Penyusutan ini disebabkan oleh penangkapan yang dilakukan sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan bahan peledak, racun dan listrik dan juga akibat dari penurunan kualitas dan kuantitas sungai dan danau.

1.5. Sanitasi Lingkungan

Desa-desa di Kabupaten Tapanuli Selatan belum mempunyai fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk membuat lingkungan menjadi asri, misalnya tidak ada saluran pembuangan, tidak memiliki septi tank dan tidak ada tempat yang dikhususkan untuk membuang sampah.

Sampah yang berasal dari pemukiman hampir sebagian besar terbuang sembarang dan banyak dari sampah ini justru masuk ke sungai melalui selokan-selokan atau yang memang sengaja dibuang langsung ke sungai dan ada juga masyarakat yang membakar sampahnya terutama di desa-desa, hal ini mengakibatkan kadang-kadang udara disekitar pemukiman kurang nyaman.

Tetapi desa belum dapat dikatakan sebagai lingkungan yang tidak nyaman, mengingat kerapatan penduduk masih rendah dan daya dukung lingkungannya masih mampu menampung beban pencemaran dan sampah domestik.

2. Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Kelestarian Lingkungan

Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang sebahagian besar berada di pedesaan masih tergolong pada masyarakat tradisional dan untuk daerah-daerah perkotaan (ibu kota Kecamatan tertentu) telah mulai bergerak menjadi masyarakat transisional awal. Masyarakat pada umumnya mempunyai keterikatan dengan banyak elemen di dalam lingkungan dan sangat tergantung pada kondisi lingkungan.

Masyarakat sendiri sebenarnya telah mempunyai kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup yang diimplementasikan melalui mitos-mitos dan kearifan tradisional lainnya. Di daerah ini kearifan tradisional yang paling banyak dijumpai adalah penerapan lubuk larangan di beberapa badan sungai.

Sejalan dengan kemajuan peradaban dan derasnya arus informasi yang memasuki masyarakat pedesaan, mitos-mitos yang dapat berfungsi menjaga kelestarian lingkungan hidup tidak lagi dipercaya masyarakat dan kearifan tradisional yang dimilikipun sudah mulai hilang.

Tabel 1. Jumlah Lubuk larangan yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2003

NO.	Nama Kelompok	Kecamatan/Desa	Nama Sungai/Lubuk	Panjang Lubuk Larangan (meter)
1	2	3	4	5
1.	Marsada	Batang Onang/ Guhung Tua Julu	Sihapas/ Sahala M.	800
2.	Rahman	Batang Onang/ Parau Sorat	Sihapas/ Sondang	500
3.	Sabar Menanti	Padangsidimpuan Timur/ Tiang Aras	Sihapas/ Tura	900
4.	Mawar	Padangsidimpuan Timur/ Borgot Topang	Kumal/ Saribu	700
5.	Beringin	Batang Angkola/ Pasir Nauli	Batang Angkola/ Bulan	900
6.	Satahi	Batang Angkola/ Sipange Godang	Batang Angkola/ Sampagul	750
7.	Naulitafa	Batang Angkola/ Pangaribuan	Batang Angkola/ Nauli	800
8.	Harapan Maju	Siais/ Garonggang	Batang Salay/ Ronggang	1200
9.	Alabror	Siais/ Huik Kuik	Batang Salay/ Abror	500
10.	Saroha	Siais/ Huik Kuik	Batang Salay/ Luguh	1500

Kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup beragam dipengaruhi oleh latar belakang pekerjaan, tingkat ekonomi, pendidikan, kesadaran dan kepentingan pribadi dan budaya setempat. Munculnya permasalahan lingkungan pada umumnya disebabkan perilaku manusia yang

kurang memperhatikan aspek ekologi. Kerusakan hutan, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air dan lahan pertanian dan penyusutan keanekaragaman hayati cenderung akibat kerakusan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam, sedangkan masalah kebersihan lingkungan lebih cenderung kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan.

3. Tujuan

1. Sebagai bahan informasi tentang kondisi lingkungan hidup dan upaya pengelolaan lingkungan di Kabupaten Tapanuli Selatan,
2. Sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk akuntabilitas publik,
3. Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

4. Metodologi Penyusunan

4.1. Lingkup Kegiatan

Penyusunan dilakukan berpedoman kepada petunjuk umum yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2002. Langkah-langkah penyusunan terdiri dari:

1. Pengumpulan Data
2. Penyusunan Buku Data Basis Lingkungan
3. Pembahasan dan Perumusan Laporan Status Lingkungan
4. Penyusunan Laporan Status Lingkungan

5. Pembahasan Draf Laporan Status Lingkungan
6. Pencetakan
7. Publikasi

4.2. Metode Pengambilan Data

Data yang dimasukkan pada Buku Data Basis Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari:

1. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2003,
2. Dinas dan Instansi terkait di Kabupaten Tapanuli Selatan ,
3. Kantor Camat se-Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Data dokumentasi dari hasil kompilasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dari berbagai sumber.

4.3. Metode Analisis

Metode yang digunakan berdasarkan rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2002 yaitu dengan memakai pola Pressure (Tekanan)-State (Kondisi)-Response (Reaksi) atau lebih dikenal dengan nama PSR.

4.4. Sistematika

Laporan Status Lingkungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan disajikan dalam 2 (dua) buku yang terdiri dari :

1. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

Abstrak

I Pendahuluan

II Kebijakan Pembangunan Daerah Berkelanjutan

III Analisis Isu Lingkungan dan Evaluasi Kebijakan

IV Rekomendasi

Daftar Pustaka

2. Basis Data Lingkungan Hidup

Memuat data lingkungan hidup yang terdiri dari :

1. Sumber Daya Alam
2. Sumber Daya Manusia
3. Sumber Daya Buatan

II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

Pembangunan yang sudah berlangsung selama ini telah menimbulkan dampak negatif pada ekosistem dan lingkungan, seperti pencemaran air dan udara di kawasan industri dan perkotaan. Padahal pembangunan itu sendiri pada hakekatnya adalah suatu proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur.

Pembangunan berkelanjutan sebagai strategi alternatif untuk mengurangi dampak negatif dari proses pembangunan. Dewasa ini seluruh Negara memakai strategi alternatif ini. Kesadaran ini muncul, ketika semua Negara diseluruh dunia disentakkan oleh adanya lubang ozon, pemanasan global, perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut dan tenggelamnya beberapa pulau di dunia.

Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sering mengalami benturan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan ekologi sebagai akibat tingginya tuntutan permintaan terhadap kebutuhan pangan, sandang, papan dan kebutuhan lainnya.

1. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup

Kebijakan adalah suatu keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari yang membuat dan memenuhi keputusan tersebut. Kebijakan sebagai hasil keputusan dimaksud untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan diterima sebagai suatu hasil keputusan bersama.

Pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan dengan berupaya mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan melalui pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang seimbang dan hemat serta mengupayakan pemulihan kembali kerusakan dan pencemaran yang timbul akibat dari pembangunan fisik dan ekonomi dengan memperhatikan perkembangan penduduk dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Dalam rencana strategis program pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2001 – 2005 yang dituangkan pada Perda Nomor 8 tahun 2001 ditetapkan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup daerah, yaitu;

1. Mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dengan mengacu pada perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
2. Pengadaan data dan informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup beserta kelengkapan peraturan dan syarat pengelolaan;
3. Menanam dan mensosialisasikan prinsip etika dan moral dalam pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan;
4. Mengupayakan pola kemitraan dalam pengendalian lingkungan hidup dan menyelesaikan kasus-kasus lingkungan hidup dengan norma-norma adat dan budaya yang ada di masyarakat, sebelum penerapan hukum lingkungan;
5. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan.

Program dan kegiatan yang dicanangkan selama periode ini adalah

1. Program penanggulangan pencemaran lingkungan, dengan kegiatan:
 - 1). Pengendalian dampak lingkungan;
 - 2). Pelaksanaan pemantauan/pengawasan RKL/RPL dan UKL/UPL secara berkala;
 - 3). Penyuluhan peraturan/hukum lingkungan;
 - 4). Pelaksanaan pemantauan/pengawasan pembuangan limbah industri secara berkala.

2. Program pemulihan kualitas lingkungan;

- 1). Inventarisasi dan identifikasi masalah lingkungan;
- 2). Penyusunan Neraca Kualitas Lingkungan Daerah (sekarang ini Laporan Status Lingkungan Daerah);
- 3). Program kali bersih (Prokasih);
- 4). Konservasi tanah dan lahan melalui reboisasi dan penghijauan;
- 5). Pembangunan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan kota;
- 6). Rehabilitasi lahan kritis;
- 7). Peningkatan pelayanan umum bidang kebersihan dan pertamanan;
- 8). Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang keberadaan hutan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan;
- 9). Pembangunan dan penataan lampu penerangan jalan umum dan taman.

3. Program pembinaan dan penyuluhan masyarakat dan dunia usaha untuk kesadaran lingkungan hidup, meliputi kegiatan:

- 1). Penerapan teknologi ramah lingkungan;
- 2). Pengembangan data dan informasi lingkungan hidup daerah
- 3). Pengembangan kelembagaan;
- 4). Penyuluhan masyarakat;
- 5). Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- 6). Pembinaan kebersihan lingkungan pemukiman;
- 7). Mensosialisasikan tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup;
- 8). Penegakan hukum lingkungan.

Dalam rangka mencapai arah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan membentuk institusi yang bertugas di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dengan memfasilitasinya dengan peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana pendukung dan aparatur.

2. Kebijakan Tata Ruang

Prinsip utama penataan ruang adalah lestari, optimum, serasi dan seimbang. Lestari adalah prinsip pemanfaatan ruang berkelanjutan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan hidup, Optimum adalah pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan karakteristik biofisik wilayah dan sosial budaya masyarakat setempat. Serasi dan seimbang dimaksudkan adalah pemanfaatan ruang pada tingkat lokal harus memperhatikan wilayah sekitarnya dan memperhatikan kebijakan pembangunan yang lebih luas secara regional dan nasional.

Penyusunan tata ruang wilayah kabupaten tapanuli selatan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang disebutkan, bahwa tata ruang wilayah kabupaten adalah merupakan penjabaran dari tata ruang propinsi ke dalam strategi pelaksanaan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang meliputi :

1. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
2. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
3. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Selanjutnya, rencana tata ruang wilayah kabupaten berisi:

1. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
2. Pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
3. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem pemukiman pedesaan dan perkotaan;
4. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairandan prasarana pengelolaan lingkungan;
5. Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lainnya serta memperhatikan keterpaduannya dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan berfungsi sebagai pedoman untuk :

1. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan kesimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten;
3. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat kabupaten;
4. Penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten;
5. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2002 – 2012 pembagian kawasan di daerah ini, adalah sebagai berikut :

2.1. Kawasan lindung

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan dan terpeliharanya fungsi pelestarian, upaya pengaturan dan perlindungan perlu dituangkan kedalam kebijaksanaan pengembangan tata ruang dalam bentuk ditetapkan kawasan lindung yang memberikan arahan bagi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, yang dimaksud Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan. Sedangkan sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah:

1. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
2. Mempertahankan keanekaragam tumbuhan, satwa, ekosistem dan keunikan alam.

2.1.1. Kawasan Yang memberi perlindungan fungsi kawasan bawahannya terdiri dari:

1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan ini memberi perlindungan pada pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Luas Kawasan hutan lindung 131.607 hektar.

2. Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air di Kabupaten Tapanuli Selatan disatukan dengan dalam kawasan hutan lindung. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (Aquifer) yang berguna sebagai sumber air.

3. Kawasan Bergambut/Bakau

Kawasan Bergambut/Bakau berfungsi mengendalikan hidrologi wilayah sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan, terdapat di Kecamatan Siais, Kecamatan Padangsidempuan Barat dan Kecamatan Batangtoru:

2.12. Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari :

1. Kawasan Sempadan Pantai

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki pantai sepanjang 42 km yaitu pantai Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat yang berada di pantai barat

Sumatera. Mengingat kapasitas pantai hanya 42 km maka di sempadan pantai dibentuk mengikuti bentuk fisik pantai. Lebar sempadan pantai adalah bervariasi minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

2. Kawasan Sempadan Sungai

Perlindungan pada kawasan ini ditujukan untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dari setiap kegiatan yang mengganggu kualitas air sungai, kondisi bantaran dan dasar sungai serta mengamankan aliran air sungai. Kawasan ini masih dapat digunakan untuk kegiatan budidaya sejauh tidak mengganggu fungsi lindungnya, misalnya digunakan untuk lapangan olah raga, kawasan rekreasi dan sebagainya.

3. Kawasan Sekitar Danau

Kawasan sekitar danau adalah kawasan tertentu di sekeliling danau yang mempunyai manfaat penting mempertahankan fungsi danau. Di kabupaten Tapanuli Selatan ada 5 (lima) kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan sekitar danau yaitu: Danau Siais, Danau Marsabut, Danau Tao, Danau Nabirong dan Danau Tasik.

2.1.3. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

1. Kawasan Suaka Alam

Kawasan suaka alam adalah kawasan yang memiliki ekosistem khas merupakan habitat yang memberi perlindungan bagi perkembangan flora, fauna yang khas dan beraneka ragam. Perlindungan terhadap kawasan suaka alam dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem,

gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pengembangan pada umumnya.

Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa.

Cagar alam di daerah ini adalah Cagar Alam Sibual-Buali dan Cagar Alam Dolok Sipirok yang sebagian wilayahnya masuk ke Kabupaten Tapanuli Selatan.

Suaka Margasatwa yang ada yaitu Suaka Margasatwa Barumon dan Suaka Margasatwa untuk pelestarian Gajah berada di Kecamatan Sosa yang berbatasan dengan Propinsi Riau.

Bentuk suaka alam yang lain adalah suaka alam perairan yang berfungsi melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan.

Suaka alam jenis ini di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Alam Perikanan Danau Marsabut di Kecamatan Sipirok.

2. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Budaya adalah kawasan tempat bangunan hasil budaya manusia bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas berada.

Perlindungan diberikan agar kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan keragaman bentuk geologi

terlindung dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Kawasan ini terdapat di Kawasan Cagar Budaya Candi

Portibi di Kecamatan Portibi, Candi Sapamutung dan Candi Tandihat di Kecamatan Barumon Tengah dan Candi Sangkilan di Kecamatan Barumon.

3. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki kawasan yang berpotensi mengalami bencana alam berupa gempa bumi disebabkan daerah tersebut merupakan daerah " patahan atau sesar" semangko. Kawasan ini memanjang membujur daerah barat laut,tenggara.

2.2. Kawasan Budidaya

Kawasan ini ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan yang berada di luar kawasan lindung. Penetapan kawasan budidaya dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimalisasi pemanfaatannya.

Pengarahan kawasan budidaya dalam rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk:

1. Memberi arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan;
2. Memberi arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang antar kegiatan budidaya yang berbeda;
3. Memberi arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya terutama ke jenis yang lain.

Proses penentuan kawasan budidaya ini mengacu kepada :

1. Kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelumnya dan menjadi pembatas bagi penetapan kawasan budidaya;
2. Kriteria menurut pedoman penyusunan rencana tata ruang daerah yang diterbitkan oleh kelompok kerja tim tata ruang nasional;
3. Rencana strategi program pembangunan daerah;
4. Rencanan Struktur Tata Ruang yang dituju;
5. Hasil masukan analisis fisik, sosial, ekonomi dan struktur tata ruang.

Berdasarkan uraian di atas maka kawasan budidaya yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah:

2.2.1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi diarahkan ke Kecamatan Padangsidempuan Barat, Kecamatan Padangsidempuan Timur dan Kecamatan Sipirok serta sebahagian di Kecamatan Arse. Sedangkan Kawasan Hutan Produksi Terbatas diarahkan di Kecamatan Sosa dan Kecamatan Batang Onang, yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang eksploitasi dapat dilakukan hanya dengan tebang pilih dan tanam.

Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan produksi yang dieksploitasi dengan cara tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Konversi tidak terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan.

2.2.2. Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dibagi menjadi Kawasan Tanaman Lahan Basah, Kawasan Lahan Kering, Kawasan Tanaman Tahunan (perkebunan), Kawasan Peternakan dan Kawasan Perikanan. Luas Kawasan ini dan lokasinya dapat dilihat pada basis data.

2.2.3. Kawasan Pertambangan

Deposit mineral yang dapat ditambang di daerah ini adalah:

1. Minyak Bumi di Kecamatan Sosa, Barumon, Barumon Tengah, Padang Bolak (masih perlu diteliti lebih lanjut);
2. Belerang dan Bentonit di Kecamatan Sipirok, Padangsidempuan Timur, Barumon Tengah;
3. Andesit Hampir diseluruh kecamatan;
4. Emas di Kecamatan Batangtoru dan Siais
5. Kapur di Kecamatan Batang Onang;
6. Batubara di Kecamatan Padangsidempuan Timur;
7. Seng di Kecamatan Padang Bolak dan Kecamatan Halongonan.

2.2.4. Kawasan Perindustrian

Kegiatan industri yang digalakkan adalah industri kecil dan kerajinan yang tersebar di berbagai kecamatan serta industri yang berbasis agroindustri. Di Daerah ini belum ada kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan industri.

2.2.5. Kawasan Pariwisata

Kawasan wisata dikembangkan adalah kawasan untuk wisata alam dan wisata budaya seperti Aek Sijorni, Torsimago-mago, Danau Siais, Aek Parsariran dan Candi.

2.2.6. Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan. Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan pada daerah-daerah pusat pelayanan, yaitu pada setiap ibukota kecamatan.

2.3. Kawasan Prioritas

Kawasan prioritas merupakan kawasan dengan potensi/persoalan yang perlu ditangani mendesak (prioritas) karena akan berdampak besar kalau tidak ditangani dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Persoalan pada kawasan prioritas akan berdampak negatif besar kalau tidak diutamakan. Sebaliknya potensi di kawasan prioritas akan berdampak positif besar kalau

2.3.1 Kawasan Pertumbuhan Cepat

Kawasan pertumbuhan cepat yang perlu diprioritaskan di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kecamatan Sipirok, Kecamatan Barumon, dan Kecamatan Padangsidempuan Barat.

2.3.2. Kawasan Terbelakang

Ada beberapa kecamatan yang tergolong kepada Kawasan terbelakang yaitu:

Kecamatan Dolok, Kecamatan Dolok Sigompulan, Kecamatan Aek Bllah, Kecamatan Saipar Dolok Hole dan Kecamatan Batang Lubu Sutam.

2.3.3. Kawasan Kritis

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki lahan kritis yang terletak di Kecamatan Sosopan, Kecamatan Batang Onang dan Kecamatan Padangsidempuan Timur diarahkan untuk membatasi pembangunan terutama permukiman penduduk disepanjang Pegunungan Bukit Barisan terutama di atas kelerengan 30°. Khusus Kecamatan Sipirok tertama disepanjang Sesar Semangko diarahkan agar tidak digunakan untuk kegiatan budidaya.

2.3.4. Kawasan Perbatasan

Kawasan Perbatasan diarahkan pengembangannya terutama dalam perekonomian dan penyebaran penduduk dan dapat menyatakannya dengan kawasan perbatasan diluar Kabupten Tapanuli Selatan. Daerah yang termasuk pada kawasan perbatasan adalah :

1. Kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari :
Kecamatan Batangtoru
2. Kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari :
Kecamatan Sipirok, Kecamatan Arse, Kecamatan Saipar Dolok Hole dan Kecamatan Aek Bilah
3. Kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu terdiri dari:
Kecamatan Dolok Sigompulon, Kecamatan Dolok, Kecamatan Halongonan dan Kecamatan Barumon Tengah
4. Kawasan yang berbatasan dengan Propinsi Riau terdiri dari :
Kecamatan Barumon Tengah dan Kecamatan Sosa
5. Kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari :
Kecamatan Sosa, Kecamatan Barumon, Kecamatan Batang Angkola dan Kecamatan Siais.

2.3.5. Kawasan Pantai Barat

Kawasan Pantai Barat yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan berada di Kecamatan Padangsidempuan Barat, yaitu Desa Muara Upu yang memiliki pantai sepanjang 42 km. Kawasan ini dikembangkan ke arah sektor perikanan dan pariwisata.

3. Kebijakan Sosial, Ekonomi dan Budaya

Prinsip dasar kebijakan pembangunan berkelanjutan di bidang sosial, ekonomi dan budaya adalah:

1. Harus sesuai dengan azas keadilan dan pemerataan;
2. Adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan;
3. Dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, dan
4. Terjaganya budaya yang berkembang di masyarakat

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sesuai dengan prinsip dasar pembangunan tersebut maka rencana strategi program pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan membuat arah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan partisipasi dan prakarsa seluruh lapisan masyarakat dalam mencari pemecahan masalah-masalah kesejahteraan sosial baik dalam perumusan rencana pencegahan, penanggulangan dan pemantauan pelaksanaan;
2. Pengembangan usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip kebersamaan oleh dan untuk masyarakat;
3. Mengusahakan distribusi pendapatan yang merata bagi peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan strategi kebijakan pembangunan tersebut maka dibuat program-program di bidang kesejahteraan sosial yaitu:

1. Pengembangan potensi organisasi masyarakat, lembaga swadaya dan organisasi keagamaan untuk meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan peran aktif masyarakat termasuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk memperbaiki kesejahteraannya, dan termasuk juga peningkatan manajemen dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif pelayanan pendidikan dan kompetisi tenaga pelayan.
2. Membuka kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memasuki semua sektor usaha yang tujuannya untuk megefektifkan subsidi silang bagi golongan masyarakat non sejahtera melalui alokasi retribusi dan kemitraan.

Sedangkan arah kebijakan Pembangunan berkelanjutan di bidang budaya yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai luhur budaya daerah;
2. Mengeksploitasi nilai-nilai budaya yang kondusif dan serasi dengan pembangunan untuk menghadapi tantangan jaman dan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya yang merusak;
3. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian dalam konteks budaya daerah sebagai upaya peningkatan kreatifitas dan kepekaan dalam kehidupan secara umum;
4. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan budaya tradisional serta mendorong berkembang sentra-sentra kesenian;
5. Menjadikan kesenian daerah dan kebudayaan tradisional sebagai wahana pengembangan pariwisata Daerah.

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan dengan mengembangkan potensi daerah terutama pada sektor pertanian, peternakan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri dengan memfasilitasinya melalui peraturan-peraturan daerah yang mendukung percepatan pembangunan.

III. ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

1. Analisis Kebijakan

Analisis yang digunakan terhadap isu-isu utama lingkungan yang terjadi di daerah ini masih tetap dengan menggunakan metode yang sama dengan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2002. Analisis ini tetap dipakai selama belum ada petunjuk untuk melakukan perubahan dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Analisis dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap 3 (tiga) komponen yaitu :

1. Aktivitas atau kegiatan manusia yang memberi dampak terhadap lingkungan.
Dalam hal ini, aktivitas digambarkan sebagai tekanan atau dampak yang dapat memberi pengaruh negatif dan besar (penting) terhadap lingkungan;
2. Kondisi (state) lingkungan berisi informasi yang menggambarkan lingkungan hidup yang mendapat tekanan dari aktivitas manusia;
3. Reaksi (response) Institusi, Masyarakat dan individu di dalam menanggulangi kerusakan atau dampak negatif yang terjadi pada lingkungan.

Analisis ini ditujukan terutama untuk menguraikan penyebab permasalahan dan menyusun langkah-langkah antisipasi atau penanggulangan yang sistematis terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi. Analisis ini dikenal dengan nama metode P-S-R.

1.1. Kerusakan Hutan

1. Tekanan

Pertambahan jumlah penduduk berpengaruh langsung terhadap peningkatan kebutuhan baik pangan, sandang dan papan maupun kebutuhan lainnya, mendorong masyarakat memanfaatkan segala potensi yang ada. Sebagai daerah agraris yang memiliki hutan luas, masyarakat memperluas areal pertaniannya dengan cara membuka hutan yang berada disekitar areal pemukiman dan pertaniannya.

Permintaan pasar yang tinggi terhadap hasil-hasil perkebunan seperti sawit, karet dan kakao di sambut para investor dengan menanamkan modal pada sektor perkebunan dan agroindustri. Hal ini menyebabkan munculnya kegiatan-kegiatan pembukaan perkebunan di kawasan hutan dalam skala luas.

Tingginya nilai ekonomi hasil-hasil hutan terutama kayu serta rendahnya penegakan hukum menciptakan iklim yang kondusif bagi terjadinya penebangan liar. Penebangan liar ini telah terorganisasi dimana pengusaha dan masyarakat sekitar hutan telah menjalin kerjasama, sehingga telah banyak petani yang berubah profesi menjadi penebang, tukang angkat dan pedagang pengumpul dari kayu hasil penebangan liar.

Pembukaan areal perkebunan pada tahap pembersihan (land clearing) masih sering dilakukan baik oleh masyarakat maupun pengusaha dengan cara membakar. Hal ini dipandang dapat melakukan penghematan biaya.

2. Kondisi

Kabupaten Tapanuli Selatan secara keseluruhan mengalami perubahan musim dan iklim mikro. Beberapa tahun terakhir ini musim menjadi tidak teratur, adakalanya musim kemarau lebih panjang dari musim hujan atau sebaliknya, dengan kata lain sangat kering dan susah memperoleh air bersih pada musim kemarau dan surplus air pada musim hujan sehingga bencana banjir menjadi momok yang menakutkan.

Perubahan iklim dan musim yang tidak teratur berimbas terhadap produksi pertanian dan perilaku masyarakat di dalam mengelola lahan pertaniannya misalnya tidak sedikit yang menanam sawah dengan tanaman tahunan karena sawah sering mengalami kekurangan air.

Hutan terutama yang berada pada tanah-tanah ulayat mengalami penurunan drastis akibat penebangan liar dan pengkonversianya menjadi areal perkebunan baik yang dilakukan secara legal maupun illegal. Tetapi sampai saat ini belum diperoleh luasan yang pasti areal hutan yang dikonversikan menjadi areal perkebunan dan pertanian.

Sejalan dengan berkurangnya luasan hutan dan kualitas hutan maka dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan semakin besar. Secara umum dampak negatif yang ditimbulkan akibat kerusakan hutan di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah:

1. Terjadinya perubahan iklim mikro;
2. Peningkatan luasan lahan kritis;
3. Terjadinya perubahan tata air dan berkurangnya kemampuan tanah menyimpan air menjadi rendah;
4. Terjadinya penyusutan keanekaragaman hayati;
5. Meningkatnya polusi udara akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan, serta meningkatnya dampak turunan yang diakibatkannya.

Pada umumnya truk yang membawa kayu dari hasil penebangan liar melebihi tonase yang diperkenankan, akibatnya jalan disepanjang daerah menuju tempat penebangan kayu juga mengalami kerusakan berat.

3. Respon Institusi

Dalam rangka meminimalkan dampak negatif dari pemanfaatan hutan dan mengantisipasi peningkatan kerusakan hutan, maka di dalam Rencana Strategi Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2001-2005 dimuat arah kebijakan Pemerintah Kabupaten di sektor kehutanan. Arah kebijakan tersebut adalah:

1. Mengurangi dampak buruk pemanfaatan hutan;
2. Memanfaatkan hasil hutan selain kayu dengan seimbang;
3. Meningkatkan produksi hasil hutan dalam bentuk bahan olahan.

Sedangkan program dan kegiatan yang dicanangkan adalah :

1. Penertiban dan pengawasan terhadap pemegang HPH;
2. Pengawasan Hutan Lindung;
3. Pembinaan masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan selain kayu secara bijaksana;
4. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah hasil hutan melalui pengolahan hasil hutan;
5. Penghutan kembali dan rehabilitasi lahan kritis melalui konservasi lahan.

Indikator yang dipakai untuk menilai kebijakan yang ditetapkan tersebut adalah:

1. Berkurangnya lahan kritis, dan
2. Meningkatnya penghasilan dari hasil hutan selain kayu.

Dalam upaya menguatkan kepentingan pelestarian lingkungan pada sektor kehutanan ini, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagai institusi yang berwenang di bidang pengendalian dampak lingkungan melaksanakan fungsi koordinasi dengan instansi terkait terutama Dinas Kehutanan Daerah, agar penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dapat ditegakkan, misalnya kegiatan atau usaha di sektor kehutanan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (Amdal dan UKL/UPL).

Upaya lain yang dilakukan mempertegas dalam tata ruang mengenai status kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan prioritas agar pengembangan ketiga jenis kawasan ini tidak tumpang tindih.

4. Respon Sosial

Sikap masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang di yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tergantung kepada cara pandang dan kepentingan masyarakat terhadap hutan. Bagi masyarakat yang melakukan penebangan dan perambahan liar memandang program-program yang berfungsi melindungi kawasan hutan dianggap sebagai penghalang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan bagi masyarakat yang tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap hutan mengambil sikap yang beragam, ada yang tidak peduli dan banyak pula yang mendukung.

Khusus pada upaya rehabilitasi hutan seperti reboisasi umumnya masyarakat sangat mendukung. Sikap ini ditandai dengan bersedianya masyarakat melakukan penanaman di lahan yang mereka miliki.

Kebijakan peningkatan produksi hasil hutan dalam bentuk bahan olahan berpengaruh langsung dengan munculnya industri-industri kerajinan mebel di daerah ini. Sayangnya bahan baku yang digunakan masih banyak dari hasil penebangan liar.

1.2. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air

1. Tekanan

Penurunan kuantitas sumber daya air baik air tanah dan air permukaan lebih banyak disebabkan dampak negatif dari kerusakan hutan. Hal ini disebabkan berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan menyimpan air.

Penurunan ini terlihat pada musim kemarau dimana banyak sumur-sumur penduduk yang mengalami kekeringan dan sungai-sungai mengalami penurunan debit yang drastis.

Penurunan kualitas air khususnya air permukaan akibat dari pemanfaatan untuk kebutuhan domestik dan irigasi pertanian dan erosi di Daerah aliran sungai. Hampir di semua desa-desa dan ibukota kecamatan masyarakat mempergunakan sungai dan anak sungai untuk keperluan mandi, cuci, kakus, pembuangan limbah industri rumah tangga, industri kecil dan industri besar.

Di daerah ini ada 5 (lima) industri besar yang memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan limbah cair, meskipun telah diproses melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah cair tersebut tetap memiliki potensi mencemari lingkungan.

Tabel 2. Jumlah Industri Besar yang Terdapat Di Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Tahun 2003

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Kapasitas	Keterangan
1.	PTP. Nusantara III Hapesong	Pengolahan Karet		IPAL
2.	PT. Kirana Sapta	Pengolahan Karet	30.000 Ton/Tahun	IPAL
3.	PTP. Nusantara IV. Sosa	Pabrik Minyak Kelapa Sawit	60 Ton/Tahun	IPAL
4.	PT. Permata Hijau Sawit	Pabrik Minyak Kelapa Sawit	60 Ton/Tahun	IPAL
5.	PT. First Mujur Plantation & Industri	Pabrik Minyak Kelapa Sawit	30 Ton/Tahun	IPAL
6.	PT. Victorindo Alam Lestari	Pabrik Minyak Kelapa Sawit	60 Ton/Tahun	IPAL
7.	PT. Tapan Nadenggan	Pabrik Minyak Kelapa Sawit	60 Ton/Tahun	Land Application
8.	PT. Eka Pendawa Sakti	Pabrik Minyak Kelapa Sawit	60 Ton/Tahun	Land Application

Penurunan ini terlihat pada musim kemarau dimana banyak sumur-sumur penduduk yang mengalami kekeringan dan sungai-sungai mengalami penurunan debit yang drastis.

Penurunan kualitas air khususnya air permukaan akibat dari pemanfaatan untuk kebutuhan domestik dan irigasi pertanian dan erosi di Daerah aliran sungai. Hampir di semua desa-desa dan ibukota kecamatan masyarakat mempergunakan sungai dan anak sungai untuk keperluan mandi, cuci, kakus, pembuangan limbah industri rumah tangga, industri kecil dan industri besar.

Di daerah ini ada 5 (lima) industri besar yang memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan limbah cair, meskipun telah diproses melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah cair tersebut tetap memiliki potensi mencemari lingkungan.

Tabel 2. Jumlah Industri Besar yang Terdapat Di Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Tahun 2003

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Kapasitas	Keterangan
1.	PTP. Nusantara III Hapesong	Pengolahan Karet		IPAL
2.	PT. Kirana Sapta	Pengolahan Karet	30.000 Ton/Tahun	IPAL
3.	PTP. Nusantara IV. Sosa	Pabrik Minyak Kelapa Sawit	60 Ton/Tahun	IPAL
4.	PT. Permata Hijau Sawit	Pabrik Minyak Kelapa Sawit	60 Ton/Tahun	IPAL
5.	PT. First Mujur Plantation & Industri	Pabrik Minyak Kelapa Sawit	30 Ton/Tahun	IPAL
6.	PT. Victorindo Alam Lestari	Pabrik Minyak Kelapa Sawit	60 Ton/Tahun	IPAL
7.	PT. Tapan Nadenggan	Pabrik Minyak Kelapa Sawit	60 Ton/Tahun	Land Application
8.	PT. Eka Pendawa Sakti	Pabrik Minyak Kelapa Sawit	60 Ton/Tahun	Land Application

2. Kondisi

Saat ini sungai di Kabupaten Tapanuli selatan sangat peka terhadap perubahan musim, selain debit sungai menjadi sangat fluktuatif. Pada musim hujan juga terjadi peningkatan kekeruhan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada umumnya penurunan kualitas sungai belum sampai pada tingkat tercemar kecuali Sungai Batang Ayumi dan Sungai Sibunbar (anak Sungai Batang Angkola) yang melintasi Kota Padangsidempuan. Pencemaran yang terjadi pada kedua sungai ini paling dominan diakibatkan oleh sampah domestik, kotoran manusia, limbah rumah tangga dan limbah industri kecil dari penduduk yang bermukim disepanjang sungai terutama penduduk Kota Padangsidempuan serta dari industri pengolahan karet PT. Virco dan PT. Sihitang Raya.

3. Respon Institusi

Selain upaya-upaya meminimalkan dampak negatif dari pemanfaatan hutan dan mengantisipasi peningkatan kerusakan hutan. Upaya yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya air adalah:

Melaksanakan program penanggulangan pencemaran lingkungan dengan kegiatan pelaksanaan pemantauan/pengawasan pembuangan limbah industri yang dilakukan dengan menguji limbah cair industri yang di dibuang ke media lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala (setiap bulan) yang diprioritaskan pada industri yang tersebut pada table 2 di atas. Pengujian limbah cair dilakukan pada 4 (empat) titik.

Tabel 3. Titik Pengambilan Sampel Limbah Cair Industri Di Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Tahun 2003

Kode	Tempat Pengambilan Sampel	Keterangan
I	Inlet	Limbah cair yang keluar proses produksi
II	Outlet	Limbah cair yang keluar dari IPAL
III	Hulu Sungai	Air sungai yang belum di masuki limbah cair (50 meter ke arah hulu dari pembuangan limbah cair)
IV	Hilir Sungai	Air sungai yang sudah di aliri limbah cair (50 meter ke arah hilir dari pembuangan limbah cair)

Pengujian limbah cair industri dilakukan oleh Laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Industri di Medan. Rata-rata hasil pengujian limbah cair industri selama tahun 2003 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Rata-rata Hasil Pengujian Limbah Cair Industri Pada Titik Outlet Di Kabupaten Tapanuli Selatan Selama Tahun 2003

No.	Nama Perusahaan	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	NH3-N (mg/l)	Padatan Tersuspensi (mg/l)	pH
1	2	3	4	5	6	7
1.	PTPN. III Hapesong	56,69	104,63	19,70	34,44	8,61
2.	PT. Kirana Sapta	26,23	47,03	11,35	27,83	7,01
3.	PTPN IV. Sosa	460,03	885,58	12,91	248,08	8,40
4.	PT. Permata Hijau Sawit	752,82	1341,58	14,23	424,42	8,19
5.	PT. First Mujur Plant.& Ind.	1204,84	2303,33	13,40	459,33	7,55
6.	PT. Victorindo Alam Lestari*	-	-	-	-	-
7.	PT. Tapan Nadenggan **	845,46	1665,92	14,72	428,25	8,31
8.	PT. Eka Pendawa Sakti**	269,86	492,93	10,91	137,92	8,78
Baku Mutu Limbah Cair Karet		60	200	5	100	6 - 9
Baku Mutu Limbah Cair Sawit		100	350	5	250	6 - 9
Baku Mutu Land Application		5.000	-	-	-	6 - 9

* Tahap akhir Konstruksi

** Land Application

Lubuk larangan sebagai kearifan tradisional yang dimiliki masyarakat di dalam menjaga kelestarian lingkungan digalakkan kembali, mengingat kegiatan ini sangat banyak memberi manfaat baik dari segi ekonomi, ekologi dan sosial budaya.

Di sektor perikanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dicanangkan program yang dapat mendorong pemanfaatan danau, rawa, waduk dan laut sebagai lahan budidaya ikan pada keramba terapung, juga mendorong pemanfaatan sungai sebagai lahan budidaya ikan air deras. Kedua program ini pada akhirnya diharapkan dapat meminimalkan penyusutan kualitas sungai dan danau.

4. Respon Sosial

Program penanggulangan pencemaran lingkungan yang ditekankan pada pelaksanaan pemantauan/pengawasan pembuangan limbah industri didukung para pelaku industri dengan kesediaan mentatati ketentuan baku mutu limbah cair industri dan memberi kemudahan kepada aparat di dalam pengambilan sampel.

Pertumbuhan kearifan tradisional lubuk larangan belum memuaskan karena jumlah lubuk larangan yang ada masih tetap. Kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya mengorganisasikan masyarakat yang bermukim di sekitar badan sungai.

Pemanfaatan danau, rawa, laut dan sungai untuk lahan budi daya juga belum berpengaruh terhadap peningkatan hasil ikan dari daerah ini. Kendala yang dihadapi masyarakat adalah kurangnya dana, dan adanya kekuatiran

masyarakat terhadap kualitas sungai misalnya seringnya penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan racun hal ini sangat beresiko jika air sungai dimanfaatkan sebagai kolam air deras.

1.3. Penurunan Kesuburan Tanah Pertanian

1. Tekanan

Tingkat pengetahuan petani di daerah ini masih tergolong rendah sehingga kemampuan petani dalam mengolah tanah-tanah pertaniannya belum menggunakan teknik konservasi tanah, misalnya penggunaan pupuk yang berlebihan, penanaman komoditi yang tidak sesuai dengan kemampuan tanah, pengolahan tanah yang berlebihan, penggunaan zat-zat kimia lainnya yang tidak ramah lingkungan, dan lain sebagainya.

Terjadi alih fungsi lahan-lahan pertanian untuk penggunaan lain terutama pemukiman akibat dari penambahan jumlah penduduk, tingginya harga tanah dan besarnya nilai ekonomi yang diperoleh jika lahan pertanian digunakan untuk penggunaan lain.

2. Kondisi

Kesuburan tanah-tanah pertanian semakin berkurang karena ketidakmampuan tanah mengimbangi perlakuan yang diberikan petani dan tanah-tanah pertanian juga mengalami peningkatan laju erosi.

Tanah-tanah pertanian yang potensial telah banyak yang beralih fungsi menjadi pemukiman dan penggunaan lainnya. Sehingga Tanah pertanian bergeser pada tahap yang kurang produktif.

3. Respon Institusi

Di dalam mengantisipasi tergesurnya lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang potensial, langkah pertama yang dilakukan adalah mempertegas atau menetapkan status tanah pertanian dan perkebunan pada tata ruang daerah. Mengingat pergeseran areal pertanian dan perkebunan sangat cepat. Disatu sisi kawasan hutan banyak yang dikonversikan menjadi lahan perkebunan dan pertanian, disisi lain tidak sedikit lahan pertanian dan perkebunan tergesur menjadi areal pemukiman dan untuk penggunaan lainnya.

Melakukan penyuluhan-penyuluhan yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama petani tentang perlunya menerapkan teknik-teknik konservasi tanah di dalam mempergunakan lahan pertanian dan perkebunan.

4. Respon Sosial

Pada umumnya masyarakat belum memahami pentingnya fungsi tata ruang sehingga penegasan status tanah pada tata ruang belum mempengaruhi sikap masyarakat. Masyarakat masih beranggapan bahwa yang paling berhak terhadap pemanfaatan tanah adalah pemilik tanah tersebut, atau dengan kata lain penggunaan tanah tergantung pemilik tanah.

Penyuluhan-penyuluhan yang berfungsi meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perlunya menerapkan teknik-teknik konservasi tanah di dalam mempergunakan lahan pertanian dan perkebunan belum dapat diterapkan masyarakat, karena umumnya masyarakat masih kesulitan menerapkan hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan mereka.

1.4. Penyusutan Keanekaragaman Hayati

1. Tekanan

Penyusutan Keanekaragaman hayati ini juga merupakan dampak negatif dari berkurangnya luasan hutan dan kualitas hutan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini disebabkan sebahagian besar kekayaan biodiversity yang dimiliki daerah ini berada di hutan misalnya, Harimau, Gajah, Burung Beo, dan lain-lain.

Semakin banyaknya masyarakat mengemari satwa-satwa langka terutama jenis burung-burung tertentu dan semakin intensnya perburuan liar yang dilakukan masyarakat mendorong percepatan penyusutan keanekaragaman hayati di daerah ini.

Masyarakat masih sering melakukan penangkapan ikan cara yang tidak ramah lingkungan, misalnya penggunaan bahan peledak, racun dan listrik dan juga akibat dari penurunan kualitas dan kuantitas sungai dan danau.

2. Kondisi

Gambaran yang terperinci tentang penyusutan keanekaragaman hayati ini tidak dapat diuraikan karena minimnya data dan informasi yang diperoleh. Sampai saat ini belum ada data tentang jumlah spesies flora dan fauna yang dimiliki daerah ini.

Tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat terutama masyarakat pedesaan sudah banyak satwa yang semakin susah dijumpai, misalnya siamang (dalam bahasa daerah imbo), Kijang (hije), Kancil, landak, trenggiling, Kukang dan masih banyak lagi satwa yang mulai hilang terutama dari bangsa unggas

Biota airpun mengalami penyusutan, sejumlah spesies ikan sudah semakin susah dijumpai di sungai-sungai yang menjadi habitatnya. Penyusutan ini keanekaragaman biota air ini sangat dirasakan oleh masyarakat pedesaan di sepanjang sungai, dahulu masyarakat sangat mudah memperoleh ikan untuk keperluan lauk dan penghasilan tambahan.

3. Respon Institusi

Melakukan penyuluhan-penyuluhan dan kampanye kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keragaman hayati, misalnya mensosialisasikan Hari Cinta Puspa dan Satwa pada masyarakat. Diharapkan momentum Hari Cinta Puspa dan Satwa ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

Penegakkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan perburuan dan perdagangan satwa dilakukan dengan mempertimbangkan sosial budaya

masyarakat setempat. Karena masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dengan melakukan perburuan terhadap satwa tertentu terutama terhadap bangsa unggas.

Upaya pelestarian dan perbaikan lingkungan seperti reboisasi, rehabilitasi lahan kritis dan pemanfaatan danau, waduk, rawa dan sungai menjadi lahan budidaya serta penegasan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan prioritas dapat memberi pengaruh positif dalam menjaga keanekaragaman hayati di Kabupaten Tapanuli Selatan.

4. Respon Sosial

Penyuluhan-penyuluhan dan kampanye kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keragaman hayati dan sosialisasi Hari Cinta Puspa dan Satwa pada masyarakat disambut masyarakat dengan antusias. Sedangkan keberhasilan tujuan pelaksanaan penyuluhan masih belum tergolong berhasil.

Masyarakat belum dapat sepenuhnya menerima penegakkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan perburuan dan perdagangan satwa mengingat masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dengan melakukan perburuan terhadap satwa tertentu terutama terhadap bangsa unggas.

1.6. Sanitasi Lingkungan

1. Tekanan

Pada umumnya penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tradisi mandi, cuci dan kakus di sungai-sungai, anak sungai, pancuran dan tempat-

V. REKOMENDASI

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mutlak memperhatikan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan. Tantangan, kendala dan peluang yang dihadapi untuk pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan adalah :

1. Tantangan

- Pertumbuhan ekonomi harus diupayakan agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat ;
- Pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Potensi meluasnya lahan kritis semakin besar;
- Meningkatnya masalah lingkungan dan tuntutan peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam yang memerlukan upaya peningkatan penguasaan pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi; pengetahuan dan teknologi pengelolaan lingkungan hidup serta pelestarian fungsi lingkungan hidup;

2. Kendala

- Terbatasnya kemampuan kelembagaan pengendali dampak lingkungan;
- Minimnya sarana dan prasarana pendukung, dana yang digunakan untuk pengelolaan lingkungan hidup;

- Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia (aparatur dan masyarakat) dalam mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan agar tetap lestari fungsi dan daya gunanya bagi pembangunan yang berkelanjutan;
- Kurangnya peranserta aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan lingkungan hidup.

3. Peluang

- Tumbuhnya kesadaran, kepedulian dan tuntutan masyarakat secara nasional dan global akan pentingnya lingkungan hidup bagi pembangunan.
- Sumber daya alam yang masih tergolong alami dapat berfungsi sebagai pelindung dan penjaga kestabilan lingkungan hidup;
- Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup telah mulai memadai.

Dengan memperhatikan tantangan, kendala dan peluang tersebut, upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup kedepan dikeluarkan kebijakan yang meliputi:

1. Pemilihan lokasi pembangunan yang dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta untuk menghindari penurunan kualitas lingkungan hidup, harus selalu didasarkan kepada kemampuan dan daya dukung lingkungan. Dalam hal ini perlu penegasan dan penetapan status kawasan dalam tata ruang daerah dan penerapannya.
2. Pengurangan produksi limbah dan kadar bahan pencemar limbah;
3. Rehabilitasi dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan;

4. Penerapan Baku Mutu Lingkungan dan Baku Mutu Limbah yang ditetapkan pusat dan propinsi serta berupaya membuat dan menetapkan Baku Mutu di tingkat Kabupaten;
5. Pengembangan kelembagaan, kemampuan sumber daya manusia (aparatur dan masyarakat) dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
6. Penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan membuat peraturan daerah yang berhubungan dengan lingkungan hidup;
7. Mensinergikan kebijakan lingkungan nasional dengan kebijakan lingkungan hidup daerah melalui pelaksanaan program-program pemerintah pusat yang sesuai dengan kebutuhan daerah, seperti :
 - 1). Program Bumi Lestari, bertujuan untuk memulihkan dan mempertahankan fungsi lahan;
 - 2). Program Kali Bersih, bertujuan meningkatkan kualitas sungai sesuai dengan peruntukannya;
 - 3). Program Langit Biru, bertujuan untuk menurunkan kadar pencemar udara kegiatan industri, kendaraan bermotor dan sumber pencemar lainnya;
 - 4). Program Kota Hijau, bertujuan menciptakan kota bersih hijau dan teratur;
 - 5). Program Pantai Lestari, bertujuan memulihkan dan melestarikan fungsi ekosistem pesisir.
8. Berperan aktif dalam peringatan hari-hari yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup, seperti : Hari Bumi, Hari Lingkungan, Hari Cinta Puspa dan Satwa dan Hari Habitat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 1998. Pokok – Pokok Analisis Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. 2001. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2002 – 2010. Padangsidempuan
- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. 2003. Potensi Investasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2003. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Selatan. Padangsidempuan
- Penasehat JICA Untuk Bapedal. 1999. Selamatkan Lingkungan Hidup Oleh Kita Untuk Kita. Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 8 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2001 – 2005
- Sastrawijaya, A.T. 2000. Pencemaran Lingkungan. Rineka Cipta. Jakarta
- Slamet, J.S. 2002. Kesehatan Lingkungan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Supardi, T. 1994. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Alumni. Bandung.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 1998. Pokok – Pokok Analisis Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. 2001. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2002 – 2010. Padangsidimpuan
- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. 2003. Potensi Investasi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2003. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Selatan. Padangsidimpuan
- Penasehat JICA Untuk Bapedal. 1999. Selamatkan Lingkungan Hidup Oleh Kita Untuk Kita. Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 8 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2001 – 2005
- Sastrawijaya, A.T. 2000. Pencemaran Lingkungan. Rineka Cipta. Jakarta
- Slamet, J.S. 2002. Kesehatan Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Supardi, T. 1994. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Alumni. Bandung.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan